Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Oleh :

Tiara Puspitasari Widhiastuti

(2161B0001)

**INSTITUT ILMU KESEHATAN SURYA MITRA
HUSADA INDONESIA**

FAKULTAS FAKAR

PROGRAM STRUDI S1-FARMASI

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti

Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia

pwtiara90@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran mengenai peran Peran Pancasila dan UUD'45 dalam mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu Persatuan dan kesatuan di Era Pandemi ini. Penulis menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Informasi yang diambil berisikan tentang pemahaman UUD'45, Pancasila, Peran dan penanganan Pemerintah maupun Masyarakat di Era Pandemi (COVID-19). Penulis menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan menelusuri melalui sumber e-book, jurnal penelitian dari web internet yang terpercaya. Sebagai Bangsa yang memiliki pedoman maupun semboyan (Pancasila dan UUD'45) sudah sepatutnya Pemerintah dan Masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari guna mencegah runtuhnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, maka diperlukan kesadaran, pengetahuan/pemahaman serta kepedulian tentang kedudukan Pancasila maupun UUD'45 dari setiap individu. Dengan menerapkan konsep tersebut dengan kebersamaan dan sikap saling menghargai, maka Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia bersama-sama di Era Pandemi (COVID-19) ini.

“Jatuh banggunya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian. Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.”

(Mohammad Hatta)

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti

Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia

pwtiara90@gmail.com

A.Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan dasar Negara Indonesia, sekaligus sebagai jati diri Bangsa Indonesia (Max, 2019: 14) atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada dasarnya dapat merupakan instrument utama dalam menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan Indonesia (Widayanti dkk, 2018). Pancasila sebagai instrumen akan selalu melekat sepanjang masa sejalan dengan keberadaan dan gerak pasang naik dan pasang turunnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Kehidupan masyarakat di Indonesia sangat beragam, mulai dari keberagaman suku, ras, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan warna kulit. Hal tersebut tidak menjadi sebuah perbedaan yang harus dipertentangkan di lingkungan masyarakat. Keberagaman tersebut mendominasi masyarakat dan berlangsung begitu lama, sehingga terjalin sebuah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari diantara anggota masyarakat, sebuah interaksi antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok juga berlangsung dalam keseharian mereka.

Interaksi tersebut menumbuhkan rasa simpati dan empati, rasa saling menghormati, dan menghargai kepentingan yang dimiliki setiap anggota masyarakat. Terjalannya berbagai bentuk hubungan antara anggota masyarakat menumbuhkan nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri setiap masing-masing individu. Wujud implementasi nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kegiatan gotong royong berarti meminta tolong, yaitu pertolongan untuk mengerjakan sesuatu, tolong menolong, dan orang yang menolong mengerjakan sesuatu (Wiranoto, 2018: 28).

Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial betul betul sedang diuji dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Situasi pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa bersatu padu untuk berhadapan dengan situasi krisis menjadi sangat penting agar negeri ini tetap kokoh. Solidaritas warga di masa pandemi COVID-19 menguat dalam beragam bentuk partisipasi publik untuk membantu tenaga medis maupun warga yang terdampak (Agustina, 2020). Nilai-nilai Pancasila terejawantahkan secara aktual di masa pandemi ketika masyarakat secara sukarela bergotong royong untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang kesulitan.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti

Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia

pwtiara90@gmail.com

B. Rumusan Masalah

1. Jelaskan Pengertian dari Persatuan dan Kesatuan Bangsa!
2. Bagaimana Upaya Persatuan dan Kesatuan dapat terbentuk diantara Pemerintah maupun Masyarakat dalam mewujudkan Cita-cita Indonesia?
3. Seberapa pentingkah Persatuan dan Kesatuan dalam kontribusi memikul beban di Era Pandemi?
4. Bagaimana Persatuan dan Kesatuan dapat terbentuk diantara masyarakat pada masa pandemi?

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti

Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia

pwtiara90@gmail.com

C. Tinjauan Pustaka

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Persatuan dan Kesatuan untuk mewujudkan Cita-cita Bangsa;
2. Makna dan pentingnya Persatuan dan Kesatuan;
3. Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi (COVID-19);

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti

Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia

pwtiara90@gmail.com

D. Pembahasan

1. Makna dari Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Dengan demikian persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.

Persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Unsur-unsur sosial budaya itu, antara lain sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan.

2. Sejarah Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD'45)

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD'45. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (*bagiartikel24.blogspot.com*)

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti
Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia
pwtiara90@gmail.com

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.

Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.

3. Sejarah Pancasila (Dasar Negara)

Di dalam Kitab Sutasoma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa "Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Magrwa". Sumpah Palapa pun juga ditulis sebagai cerita tentang sejarah bersatunya nusantara untuk pertama kalinya oleh Mahapatih Gajah Mada.

Semakin berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi Bangsa Indonesia, seperti Soekarno dan H.O.S Cokroaminoto. Namun beberapa literatur yang ada tidak mendukung bahwa istilah Pancasila ditemukan oleh Soekarno. Akan tetapi Soekarno lah yang berpendapat paling lantang untuk menyuarakan Pancasila hingga Pancasila dikenal seperti sekarang ini.

a. Pembentukan BPUPKI (29 April 1946)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945).

• Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

1. peri kebangsaan,
2. peri kemanusiaan,
3. peri ketuhanan,

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti

Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia

pwtiara90@gmail.com

4. peri kerakyatan, dan

5. kesejahteraan rakyat.

- **Soepomo (31 Mei 1945)**

1. Paham Persatuan.

2. Perhubungan Negara dan Agama.

3. Sistem Badan Permusyawaratan.

4. Sosialisasi Negara.

5. Hubungan antar Bangsa yang Besifat Asia Timar Raya.

- **Soekarno (1 Juni 1945)**

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan

3. Mufakat atau Demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

b. Panitia Sembilan (22 Juni 1945)

- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

c. Sidang BPUPKI II(10-16 Juli 1945)

1. kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta.
2. negara Indonesia berbentuk negara Republik, hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir.
3. kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timor Timur, sampai Malaka (Hasil kesepakatan 39 suara).
4. pembentukan tiga panitia kecil sebagai: Panitia Perancang UUD, Panitia Ekonomi dan Keuangan, Panitia Pembela Tanah Air.

d. Sidang PPKI (18 Agustus 1945)

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti

Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia

pwtiara90@gmail.com

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

e. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968

Presiden Suharto pada tahun 1968 mengeluarkan Instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar, yaitu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Pandemi Covid-19 masih terus berlangsung hingga kini belum memberikan sinyal kapan akan berakhir. Covid-19 bukan hanya menjadi tantangan bagi tumbuh dan berkembangnya Indonesia, tetapi juga seluruh negara yang ada di dunia. Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan kepada semua masyarakat untuk mengurangi kegiatan dari luar rumah yang menyebabkan banyak terjadinya kontak fisik. Hal itu dilakukan agar korban yang terjangkit Covid-19 tidak bertambah selama maraknya penyebaran virus yang terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia.

Berdasarkan data yang dimuat dalam beberapa media, setidaknya lebih dari 1000 orang telah positif terjangkit virus Covid-19. Melihat situasi ini, Covid-19 menjadi ancaman yang bukan hanya kepada individu, namun juga kepada badan hukum, instansi-instansi pemerintahan dan organisasi dalam masyarakat. Pandemi ini membuat sejumlah kegiatan penting dalam negara terhenti, salah satunya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan-perusahaan sebagai ujung tombak dalam kekuatan perekonomian negara. Sehingga lahir kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berkala Dalam Rangka Kecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk memulihkan keadaan negara.

Kebhinekaan perlu dirajut oleh seluruh elemen masyarakat bersama organisasi kemasyarakatan dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. Semangat persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Menurut tokoh masyarakat Sumut ini, pandemi Covid-19 di Indonesia, seharusnya dijadikan momentum untuk mempererat persatuan, kesatuan dan terangkum dalam semangat kebhinekaan. Untuk

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti

Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia

pwtiara90@gmail.com

menyampaikan aspirasi sebaiknya diakomodir melalui mekanisme dan aturan melalui lembaga legislatif.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Katimin menyebutkan, Kebhinekaan merupakan kekuatan Bangsa Indonesia yang kaya atas keberagaman. Kebhinekaan dimaknai sebagai keragaman yang mempersatukan, dan menerima perbedaan sebagai sebuah kekuatan.

Seiring perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai bentuk langkah pertama berupa anjuran pembatasan sosial (*social distancing* maupun *physical distancing*). Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari COVID-19 ini dapat melalui *droplet*, percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan untuk menggunakan masker dengan tujuan untuk membatasi persebaran *droplet* tersebut. Langkah lain yang ditempuh ialah mengatur jarak antarorang agar peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan manusia harus dihindari.

Sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi persebaran virus. Pembatasan harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan rumah tangga. Selain itu, tentunya dianjurkan untuk tetap melakukan pencegahan melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir (Yunus dan Annissa, 2020: 230).

Semakin gencarnya pemberitaan terkait Covid-19 yang semakin meluas, justru menimbulkan kecemasan baru bagi masyarakat. Apalagi, sudah dua tahun lebih kita semua diharuskan beraktivitas dari rumah, yang tentu saja membuat kita cepat merasa bosan dengan keadaan demikian.

Namun dengan mematuhi anjuran pemerintah tersebut, diharapkan Covid-19 ini akan berkurang dan segera usai. Nah, di sinilah pentingnya menerapkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Karena dengan langkah yang serasi, kita akan mudah mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Secara tidak langsung, pandemi Covid-19 yang masih bertahan sampai saat ini telah mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam sila ketiga Pancasila. Seperti halnya perjuangan yang terjadi saat melawan penjajah, solidaritas dan kepedulian masyarakat ini patut

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti

Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia

pwtiara90@gmail.com

dipertahankan. Dengan begitu, semoga saja kita semua mampu terbebas dari wabah ini dan bisa lebih baik lagi berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar.

Sejatinya pemahaman nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang paling fundamental untuk mengontrol masyarakat tanpa perlu dilakukannya penegakan secara represif kepada masyarakat. Pemahaman nilai Pancasila mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat atas peraturan yang dibuat pemerintah yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang didasari dari hati masyarakat itu sendiri. Setidaknya konsep cinta tanah air pun perlu diperdalam kepada masyarakat agar pemahaman nilai Pancasila lebih kokoh ditengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Tertib merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama bangsa Indonesia. Dalam situasi apapun, penanaman nilai-nilai Pancasila dan Cinta Tanah Air akan mempermudah pemerintah untuk menghimbau masyarakat terhadap hal yang urgen dalam negara. Nilai dalam Pancasila akan membuat masyarakat sadar bahwa pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari rakyatnya untuk menangani pandemi ini. Apabila Pancasila sudah menjadi hal vital dalam masyarakat, pemerintah dan rakyat tentu akan memahami dengan pasti kewajibannya dalam bernegara.

5. Terbentuknya Persatuan dan Kesatuan antara Pemerintah dan Masyarakat

Kesadaran masyarakat serta inisiatif untuk melakukan Gerakan Kemanusiaan menjadi langkah awal untuk membentuk Persatuan dan Kesatuan diantara masyarakat. Karena bukan hanya pemerintah saja yang berperan aktif, melainkan turun tangan masyarakat pun merupakan peran penting mempercepat berakhirnya pandemi ini. Tentunya kita menyadari banyak contoh aksi sosial yang dapat kita lakukan untuk sesama seperti membagikan masker dan hand sanitizer untuk masyarakat serta alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis yang setiap saat tanggap di garda terdepan.

Selain itu, yang harus kita lakukan yaitu mengesampingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan bersama. Mari tingkatkan persatuan meskipun kita kurangi pertemuan. Sejatinya, kondisi saat ini harusnya tidak merenggangkan solidaritas melainkan bahu-membahu menolong tanpa batas. Masa pandemi ini ibarat ujian, kita dan pemerintah sedang diuji untuk bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan bangsa yang hebat. Mengutip seorang penulis, “orang hebat dan kuat bukan karena dia tidak pernah jatuh. Tapi seberapa cepat dia bangkit setelah jatuh.” Pernyataan ini juga dapat berlaku untuk menggambarkan negara dan pemerintah Indonesia.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti

Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia

pwtiara90@gmail.com

E. Kesimpulan

Sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Pemahaman nilai Pancasila mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat atas peraturan yang dibuat pemerintah yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang didasari dari hati masyarakat itu sendiri.

Tentunya kita menyadari banyak contoh aksi sosial yang dapat kita lakukan untuk sesama seperti membagikan masker dan hand sanitizer untuk masyarakat serta alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis yang setiap saat tanggap di garda terdepan. Masa pandemi ini ibarat ujian, kita dan pemerintah sedang diuji untuk bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan bangsa yang hebat.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa di Era Pandemi

Tiara Puspitasari Widhiastuti
Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Indonesia
pwtiara90@gmail.com

F. Daftar Pustaka

Persatuan dan Kesatuan di Masa Pandemi - Kompasiana.com

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA (ugm.ac.id)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Makna Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia - Gramedia Literasi

Sejarah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Dari Masa ke Masa - GuruPPKN.com

Bagi" Artikel: Penjelasan Tentang UUD 1945 (bagiartikel24.blogspot.com)

Sejarah Pancasila - Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi (cimahikota.go.id)

Persatuan dan Kesatuan (kemdikbud.go.id)

Solidaritas Masyarakat, Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19 - Kalimahsawa.ID

Semangat Persatuan Kunci Keberhasilan Penanganan Covid-19 (beritasatu.com)

Pentingnya Persatuan dan Kekompakan dalam Menghadapi Pandemi (majalah1000guru.net)

Pentingnya Implementasi Nilai Pancasila Di Tengah Pandemi Covid-19 (litigasi.co.id)

11. BAB I.pdf (unpas.ac.id)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)

Persatuan dan Kesatuan di Masa Pandemi - Kompasiana.com

03. BAB I.pdf (ums.ac.id)